

**PERAN *GLOBAL AGRICULTURE AND FOOD SECURITY PROGRAM (GAFSP)*
DALAM PENANGANAN KRISIS PANGAN DI BANGLADESH**



SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD AFIF

E 131 12 105

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**

**PERAN *GLOBAL AGRICULTURE AND FOOD SECURITY PROGRAM*
(*GAFSP*) DALAM PENANGANAN KRISIS PANGAN DI BANGLADESH**



SKRIPSI

Disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hubungan

Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

Oleh :

MUHAMMAD AFIF

E 131 12 105

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERAN *GLOBAL AGRICULTURE AND FOOD SECURITY PROGRAM (GAFSP)* DALAM PENANGANAN KRISIS PANGAN DI BANGLADESH

N A M A : MUHAMMAD AFIF

N I M : E13112105

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



Makassar, 6 Agustus 2019

Mengetahui :

Pembimbing I,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'an' followed by a stylized flourish.

Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D
NIP. 197312051998021001

Pembimbing II,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R.' followed by a flourish.

Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si
NIP. 197101092008012005

Mengesahkan :

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



H. Darwis, MA, Ph.D
NIP. 196201021990021003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Afif
Nomor Induk Mahasiswa : E 131 12 105
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hub. Internasional

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Peran Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) Dalam Penanganan Krisis Pangan di Bangladesh" adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 23 Juli 2021


(Muhammad Afif)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Al 'Alim, Al Mutakabbir, Allah SWT, atas segala rahmat-Nya yang senantiasa menemani penulis dalam setiap langkah sehingga skripsi yang menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, ini dapat terselesaikan dengan baik. Alhamdulillah. Tidak lupa penulis kirimkan salawat dan salam pada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat dan penerus beliau.

Hidup ini adalah sebuah proses dengan berbagai tahapan agar kita senantiasa memetic pelajaran dari setiap hal yang kita lalui. Salah satu tahapannya adalah masa kuliah. Selama awal masa studi hingga penyusunan dan perampungan skripsi, penulis menerima sangat banyak bantuan baik moril maupun materil secara tulus dan ikhlas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan sedalam-dalamnya pada :

1. Alm. **Abdul latief ismail** dan **Rusmiati sanrang**, kedua orangtua yang telah membesarkanku dan menerima segala kekuranganku, yang terus mendukung saya, mengingatkan saya, terutama kepada ibu saya yang selalu memberikan nasehat setiap saat. Adik-adik saya yang sangat kebanggakan, kepada **Mufti diar** yang seringpula mengingatkan saya untuk menyelesaikan kuliah, kepada **Ayman haerudin** yang selalu mendoakan keberhasilan saya dan terimakasih telah mendukung saya hingga selesai
2. Dosen Pembimbing skripsi, Bapak **Muh. Nasri Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D** dan Ibu **Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si**. Terima kasih banyak atas bimbingan dan arahan selama pengerjaan skripsi. Walaupun saya sering menghilang dan tidak menepati janji untuk setiap kali bimbingan.
3. Dosen-dosen serta segenap staff Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, terima kasih banyak atas dedikasi serta edukasi yang diberikan selama tujuh tahun dikampus. Serta tidak lupa pula terimakasih saya ucapkan untuk **Ibu Rahma** dan **Ibu Tia**, terima kasih banyak atas bantuan dalam hal pengurusan administrasi hingga detik-detik terakhir dikampus.
4. Terimakasih kepada **Maya muthia khaerunnisa**, istriku, sebagai orang yang berperan besar dalam hidup saya, membangunkan saya setiap hari, rela menemani saya dalam mengurus kuliah meskipun dalam keadaan hamil, dan selalu memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Teman Angkatan **HI 2012 (INTERRUPTERS)**, khususnya para **Lelaki Penggosip** yang selalu memberikan dukungan dan hiburan hingga teguran serta dorongan untuk menyelesaikan studi saya.
6. Terimakasih pula kepada semua pihak, teman - teman yang tidak bisa saya cantumkan serta sebutkan satu per satu semuanya

Makassar, 16 agustus 2019

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	10
A. Latar Belakang	10
B. Batasan dan Rumusan Masalah	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	19
D. Kerangka Konseptual.....	20
E. Metode Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Organisasi Internasional	29
B. Bantuan Luar Negeri.....	38
C. Ketahanan Pangan.....	44
BAB III GLOBAL AGRICULTURE AND FOOD SECURITY	
PROGRAM (GAFSP) DAN KRISIS	
PANGAN DI BANGLADESH	49
A. Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP).....	49
1. Pengenalan Program	49
2. Proyek GAFSP.....	55
B. Permasalahan Krisis Pangan.....	61
1. Permasalahan Krisis Pangan di Negara Berkembang	61
2. Krisis Pangan di Negara Bangladesh.....	69

BAB IV PERAN GLOBAL AGRICULTURE AND FOOD	SECURITY PROGRAM (GAFSP)
DALAM PENANGANAN	KRISIS PANGAN DI BANGLADESH..... 71
A. Peran GAFSP dalam Penanganan Krisis Pangan di Bangladesh.....	73
B. Faktor Pendukung Pelaksanaan GAFSP dalam Penanganan Krisis Pangan di Bangladesh.....	82
C. Faktor Penghambat Pelaksanaan GAFSP dalam Penanganan Krisis Pangan di Bangladesh.....	83
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	91

ABSTRAK

Muhammad Afif, E 131 12 105, Peran Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) dalam Penanganan Krisis Pangan di Negara Bangladesh, di bawah bimbingan Muhammad Nasir Badu, Ph.D selaku pembimbing I dan Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) dalam menangani krisis pangan di Bangladesh. Secara mendalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program GAFSP untuk menangani krisis pangan di Bangladesh.

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud pada penelitian ini, maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian deskriptif eksplanatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi pustaka. Adapun untuk menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, dan untuk pembahasan masalah penulis memakai teknik penulisan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) memiliki peran yang cukup besar dalam menangani krisis pangan di Bangladesh melalui program Integrated Agricultural IAPP.

Kata Kunci : Peran, GAFSP, Krisis Pangan, IAPP, Bangladesh.

ABSTRACT

Muhamad Afif, E 131 12 105, Role of the Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) in dealing with the food crisis in Bangladesh, under supervision of Muhammad Nasir Badu, S.Sos, M. Hum, Ph.D as mentor 1 and Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si as mentor 2, at the Department of International Relations, Faculty of Sosial and Political Sciences. Hasanuddin University.

This study aims to determine the role of the Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) in dealing with the food crisis in Bangladesh. In depth this study aims to describe how the supporting factors and inhibiting factors in the implementation of the GAFSP program to deal with the food crisis in Bangladesh.

To achieve the intended purpose of this study, the research method that I use is an explanatory descriptive research type. The data collection technique that I use is library research. As for analyzing the data, the author uses qualitative analysis techniques, and to discuss the problem the author uses inductive writing techniques.

The results of the study show that the Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) has a significant role in dealing with the food crisis in Bangladesh through the Integrated Agricultural IAPP program.

Keyword : Role, GAFSP, Food Crisis, IAPP, Bangladesh

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Food and Agriculture Organization mendefinisikan ketahanan pangan sebagai akses terhadap rumah tangga atau individu untuk dapat memperoleh pangan setiap saat Puntuk keperluan hidup yang sehat. Selain itu, pada *World Food Summit* tahun 1996, ketahanan pangan disebut sebagai akses terhadap rumah tangga atau individu untuk dapat memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperluan hidup yang sehat dengan persyaratan penerimaan pangan sesuai dengan nilai atau budaya setempat. Hal yang menjadi indikator utama untuk melihat ketahanan pangan suatu negara adalah ketersediaan bahan pangan, distribusi, dan pola konsumsinya

Fenomena kemiskinan global yang meningkat seiring dengan peningkatan harga pangan global seakan menjelaskan kepada kita betapa pangan dan pertanian memiliki pengaruh yang sangat besar dalam stabilitas ekonomi politik global. Negara dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi bisa disebut negara yang rentan, baik dari segi ekonomi dan juga dari segi politik. Kesejahteraan setiap warga negara menjadi tanggung jawab negara. Dalam hal ini, negara bukannya memberikan uang tunai atau gaji bulanan untuk warga negaranya, melainkan sebaiknya merumuskan metode yang tepat dan sesuai kebutuhan warga negaranya, agar warga negaranya bisa berusaha dan keluar dari jurang kemiskinan. Apabila kekurangan pangan masih saja menjadi masalah dalam suatu negara yang kemudian mengakibatkan kemiskinan di negara tersebut, maka besar kemungkinan negara tersebut akan goyah secara politik.

Warga negara yang tidak mendapatkan haknya untuk bertahan hidup jelas akan memperjuangkan haknya, dan jika gerakan massa ini tidak terkontrol, bisa saja kemudian mengganggu kestabilan suatu negara. Robert B. Zoellick menyatakan, "*Global food crisis are rising to dangerous levels and threaten tens of millions of poor people around the world*" (The World Bank, 2011). Secara jelas, presiden Bank Dunia ini memberi isyarat kepada dunia bahwa krisis pangan tengah mengancam dunia internasional saat ini. Selain itu, pihak yang diperkirakan akan sangat merasakan dampak dari krisis pangan ini adalah rakyat miskin di dunia dan jutaan jiwa yang diperkirakan akan terjerumus pula dalam jurang kemiskinan.

Selain mengancam puluhan juta orang untuk terjerumus dalam jurang kemiskinan, Robert B. Zoellick pun menambahkan bahwa kenaikan harga yang berujung pada krisis pangan global ini mengancam jutaan orang mengalami tekanan (The World Bank, 2011). Di Skotlandia pada tanggal 12 Maret 2008 menuliskan bahwa krisis pangan pada saat itu akan menjadi krisis pangan terbesar abad ke-21 (Santosa, 2008). Protes akan krisis pada saat itu telah terjadi di beberapa belahan dunia dan cukup menyebabkan ketegangan dan tantangan bagi kestabilan ekonomi politik global, seperti di India, Senegal, Mauritania, Meksiko, Yaman, Bangladesh, Ethiopia, dan beberapa negara lain di sekitar Sub-Sahara dan Asia Selatan.

Fenomena krisis pangan yang terjadi tahun 2008 silam dianggap sebagai fenomena yang sudah cukup menyulitkan masyarakat global. Oleh karena itu, faktor-faktor penyebab yang kembali bermunculan lagi akhir-akhir ini membuat beberapa aktor global merumuskan berbagai metode pencegahan dan bergerak cepat untuk berbagai macam proses pencegahan. Dalam data FAO dijelaskan ada 37 negara yang pada saat itu sedang mengalami krisis pangan internal yang mungkin saja berpengaruh secara global jika tidak diantisipasi lebih

dini (Nizami, 2008). Dan kebanyakan dari 37 negara yang terdaftar tersebut termasuk dalam golongan Negara Berkembang dimana sebagian besar kebutuhan utama rumah tangganya adalah makanan (pangan).

Terancamnya 37 Negara Berkembang oleh isu krisis pangan yang dapat berpengaruh pada negara-negara lain di tingkat global bukanlah suatu hal yang mencengangkan, khususnya dalam era globalisasi sekarang ini. Globalisasi secara sederhana dipahami sebagai suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global (Fakih, 2009, hal. 211). Namun, jika dianalisis lebih lanjut, terlebih jika meninjau dari sejarah perkembangannya, globalisasi pada dasarnya merupakan suatu perkembangan dari proses kapitalisme liberal yang sebenarnya telah dikembangkan lebih dulu oleh Adam Smith.

Pada tahun 2010, fenomena harga pangan yang meningkat kembali mengancam ketahanan pangan global. Dalam situs resmi Bank Dunia pada tanggal 15 Februari 2011 disebutkan bahwa peningkatan harga pangan global telah menjerumuskan lebih kurang 44 juta jiwa masyarakat di Negara-Negara Berkembang dalam kemiskinan. Peningkatan harga pangan ini mulai terdeteksi sejak Juni 2010 hingga sekarang. Nilai indeks harga yang terus saja meningkat hampir menyamai indeks harga pada tahun 2008 silam menjadi salah satu penyebab dunia mengalami krisis pangan global.

Krisis pangan tahun 2008 lalu menyebabkan setidaknya 5 orang tewas dalam aksi unjuk rasa yang menentang kebijakan naiknya harga pangan dan bahan bakar yang berujung bentrok di Haiti. Unjuk rasa ini bahkan berhasil menurunkan pemerintahan yang sedang berkuasa pada saat itu. Haiti merupakan salah satu negara yang cukup rentan terhadap gejolak harga pangan global. Beberapa Negara lain, diantaranya Ethiopia, Mesir, Kamerun, Pantai

Gading, Mauritania, Madagaskar, Togo, Mongolia, Niger, Rwanda, Sierra Leone, Bangladesh, dan beberapa Negara Berkembang lain merupakan negara yang juga rentan terhadap gejolak isu pangan global.

Negara-negara diatas pada umumnya merupakan Negara Berkembang disekitar Asia dan Afrika yang sebenarnya memiliki sumber berpengaruh bagi dunia. Perhatian ini seringkali diwujudkan dalam bentuk bantuan ke pihak-pihak yang membutuhkan. baik yang memberi, maupun yang menerima bantuan tidak mesti negara saja. Banyak juga lembaga-lembaga donor yang menaruh perhatian lebih terhadap kasus pangan ini seperti *World Food Program*, *Oxfam*, *Bill and Mellinda Gates Foundation*, dan beberapa lembaga donor lainnya. Selain lembaga donor, kasus pangan pun sering menjadi pembahasan dalam beberapa forum kesepakatan perdagangan tingkat global seperti WTO (*World Trade Organization*), NAFTA (*North American Free Trade Agreement*), APEC (*Asia Pasific Economic Confrence*), dan beberapa forum regional lainnya.

Namun, hingga kini krisis pangan masih saja menjadi ancaman tersendiri bagi perkembangan pangan global, meskipun telah mendapat perhatian oleh banyak pihak. Bantuan-bantuan yang ditawarkan seakan tidak menjawab kebutuhan dasar masyarakat global. Tidak lepasnya isu krisis pangan dalam wacana global yang sampai sekarang masih dirasakan dampaknya oleh masyarakat-masyarakat kelas bawah menjadi jawaban bagi pernyataan tersebut.

Bank Dunia, yang dikenal sebagai organisasi internasional yang selalu menaruh perhatian terhadap Negara-Negara Berkembang dengan setiap bantuannya, juga telah melakukan beberapa pergerakan untuk mengatasi fenomena krisis pangan global ini. Pada tanggal 19 Maret 2010, Bank Dunia melalui program *Global Food Crisis Response Program*

memfasilitasi *European Union Food Crisis Rapid Response Facility* untuk membantu masalah pangan Kenya dengan bantuan hibah sebesar 19,3 juta Euro (Indonesia Biotechnology Information Center, 2010). Bank Dunia juga bekerjasama dengan *World Food Programme* untuk membantu 22 juta anak-anak di 70 negara yang mengalami kesusahan untuk mengakses pangan (The World Bank, 2011).

Hal terbaru yang dirumuskan Bank Dunia untuk membantu permasalahan krisis pangan global yakni dalam *Global Agriculture and Food Security Program* atau GAFSP (Global Agriculture & Food Security Program, 2016). GAFSP adalah program yang diharapkan dapat dijadikan sebagai mekanisme pendampingan multilateral dalam pengimplementasian hasil keputusan dari pertemuan G8-HF di L'Aquila pada Juli 2009, dan di *follow up* kembali pada pertemuan negara-negara anggota G20 di Pittsburgh, Pennsylvania pada September 2009 (World Bank, 2009). Hasil pertemuan pada saat itu pada umumnya bertujuan untuk menaikkan bantuan bagi negara-negara miskin untuk meringankan fenomena kemiskinan, meningkatkan standar hidup pedesaan, dan mewujudkan ketahanan pangan dengan cara peningkatan produktivitas pertanian, memudahkan jalan para petani masuk dalam pasar global, mengurangi resiko dan kerentanannya, peningkatan standar kehidupan pedesaan yang tidak tergolong pertanian, dan beberapa bantuan teknis lainnya.

GAFSP ini secara terus menerus diharapkan dapat mendukung usaha-usaha peningkatan dalam bidang pertanian dan pangan. Program terbaru Bank Dunia untuk penanganan krisis pangan global oleh berbagai pihak yang dirumuskan dalam konsep GAFSP ini menjadi harapan dunia. Tujuannya, yaitu untuk mengisi kesenjangan pembiayaan dalam negara, terkhusus dalam bidang pertanian, dengan strategi keamanan pangan (World Bank,

2009). Dalam penerapannya, program ini hanya diterapkan di delapan negara yang dianggap paling membutuhkan bantuan ini. Kedelapan negara tersebut, yaitu Togo, Niger, Bangladesh, Mongolia, Rwanda, Haiti, Ethiopia, dan Sierra Leone. Dengan demikian, maka sangat diharapkan dapat memberi kontribusi positif dalam usaha pencapaian poin I MDGs untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan sebesar 50% di tahun 2015.

Bangladesh juga merupakan satu dari banyak negara di Asia yang juga tengah diselimuti masalah kelaparan. Krisis pangan tahun 2008 lalu setidaknya juga berdampak pada naiknya harga pangan yang menyulitkan rakyat kelas menengah ke bawah untuk mendapatkan panganannya. Selain itu, keadaan ini diperparah dengan wabah tikus yang melanda Bangladesh yang mengakibatkan gagal panen berskala besar dalam pertanian nasionalnya.

Secara umum penyebab terjadinya krisis pangan Bangladesh akibat berbagai hal diantara, penurunan produksi pangan akibat bencana alam, lonjakan harga pangan (inflasi) akibat kenaikan biaya produksi pangan yang disebabkan oleh kebijakan pembatasan dan pelarangan ekspor bahan pangan yang diambil negara-negara eksportir seperti India dan China. Bencana tersebut bergerak begitu cepat dan menyebabkan kerusakan luas sehingga tidak ada negara atau organisasi pembangunan yang bisa mengatasi masalah tersebut sendiri. Krisis pangan yang melanda Bangladesh benar-benar membuat negara tersebut harus berfikir keras mencari solusinya. Krisis pangan dikhawatirkan akan menyebabkan bencana kelaparan yang mengiringinya.

Krisis pangan di Bangladesh dipengaruhi langsung oleh bencana alam yang terjadi seperti banjir musiman dan juga badai. Data historis menunjukkan bahwa selama 50 tahun terakhir setidaknya 7 banjir besar telah terjadi di Bangladesh, beberapa yang terburuk adalah tahun 1987, 1988, 1998, 2004 dan 2007 banjir ini layak disebutkan karena bencana ini

membanjiri 30% atau lebih dari daratan negara tetangga India tersebut. Selama tahun 2007, banjir musim telah dua kali sebelumnya menghantam Bangladesh menyebabkan kerugian produksi pertanian yang luas dan merusak aset fisik, sebesar hampir US \$ 1,1 miliar.

Selain banjir, bencana yang selalu melanda Bangladesh adalah topan, pada November 2007 Topan Sidr melanda Bangladesh menyebabkan kerusakan, Diperkirakan 1,12 juta ha lahan rusak sepenuhnya dan hampir 1,39 juta ha rusak sebagian. 1,87 juta ternak dan unggas mati akibat topan Sidr tersebut. Kemudian hilangnya mata pencaharian bagi hampir 7 juta orang yang terkena dampak bencana. Laporan Bank Dunia menunjukkan, topan Sidr menewaskan ribuan orang di Bangladesh dan menyapu lahan-lahan padi di negara itu (IBRD IDA World Bank, 2011).

Di tahun 2008, Bangladesh menempati urutan ke-70 dari 88 negara yang terdata dalam *Global Hunger Index* (World Bank, 2015). Perhatian dunia sangat besar untuk mengatasi permasalahan pangan global ini yang diantisipasi untuk tidak masuk ke ranah krisis lagi. Perhatian ini jelas adalah suatu hal yang dibutuhkan mengingat posisi pangan dalam suatu negara dan posisi pangan dalam ekonomi politik global yang sangat penting dan ekonomi politik sebuah negara. Termasuk juga program bantuan GAFSP yang ditawarkan Bank Dunia dengan harapan dapat membantu Negara-Negara Berkembang mengatasi masalah krisis pangan di negaranya.

Program bantuan pendanaan multilateral GAFSP terhadap Bangladesh diratifikasi pada 14 Juni 2010 dan diberlakukan dalam program pembangunan pertanian dan pangan jangka panjang untuk Bangladesh yang mulai diberlakukan dalam *Bangladesh Country Investment Plan* (BCIP) untuk periode 2010-2025. Secara umum, program bantuan pendanaan multilateral GAFSP ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan

masyarakat miskin di beberapa Negara Berkembang melalui kebijakan dan kepemimpinan Negara dan pemerintahnya dalam mengolah solusi untuk permasalahan pangan negaranya. Di Bangladesh, program bantuan ini dialokasikan dalam 12 program kegiatan yang dikembangkan dari tiga sektor bantuan yang diberikan oleh GAFSP. Penentuan kedua belas sektor ini berdasarkan program perencanaan pembangunan nasional Bangladesh, khususnya dalam sektor pertanian dan pangan. Program-program ini kemudian dirumuskan dalam BCIP sebagai kerangka kerja.

Adapun kementerian yang berkolaborasi dengan organisasi internasional GAFSP dalam menangani krisis pangan di Bangladesh adalah Menteri Pangan dan Menteri Penanggulangan Bencana (Government of the People's Republic of Bangladesh, 2011, hal. 7). Selain itu, dalam laporan GAFSP kelima tahun 2015 disepakati oleh Sekretaris Menteri Pertanian dengan anggota FAO Bangladesh; anggota GAFSP dan perwakilan petani di Bangladesh dalam mengimplementasikan *Integrated Agricultural Productivity Project (IAPP)* pada tahun 2015 (Penunia, Dey, SAbri, & Islam, 2015).

Selain itu, organisasi petani di Bangladesh berpartisipasi dalam peningkatan pembangunan dari organisasi FAO di bawah bagian proyek *Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP)*. Menurut Md. Mahmud Hossain, ketua tim nasional IAPP-TA di Bangladesh berkata bahwa proyek penyatuan produktivitas agrikultur, dalam hal ini adalah bahan-bahan pangan telah diwakili oleh anggota dari dua wilayah dan mereka menghadiri pertemuan secara reguler (Asian Farmers Association, 2014).

Proyek organisasi petani Bangladesh tahun 2012 adalah memperkuat organisasi petani secara pengetahuan dan kemampuan untuk mencapai ketahanan produksi pangan. Proyek ini bernama FosSP dengan tujuan untuk menginisiasi dasar program *Kendrio Krishok Moitree*

(KKM) atau nama solidaritas antara petani untuk menunjukkan isu ketahanan makanan dan nutrisi bagi para petani di Bangladesh (Farmers Organizations Strengthening Project-AsiaDHARA, 2012).

Organisasi GAFSP memiliki beberapa program dalam menangani krisis pangan di Bangladesh. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis sampai sejauh mana peran organisasi ini dalam menangani masalah krisis pangan di Bangladesh. Selain peran, penulis juga akan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program GAFSP di Bangladesh. Sehingga topik penelitian peran organisasi internasional, GAFSP dalam menangani krisis pangan sebagai di Bangladesh. Oleh karena itu, judul yang penulis pilih adalah "*Peran Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) dalam Penanganan Krisis Pangan Di Bangladesh*".

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada melihat dan menganalisis sejauh manan peranan Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) dalam penanganan permasalahan krisis pangan di Bangladesh. Hal ini dapat dilihat dari strategi pelaksanaan program GAFSP dalam mengurangi krisis pangan Bangladesh. Selain itu, penulis juga akan mengidentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaan program GAFSP di Bangladesh.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah:

1. Bagaimana peranan GAFSP dalam menangani krisis pangan di Bangladesh?
2. Apa saja faktor pendukung bagi GAFSP dalam menangani krisis pangan di

Bangladesh?

3. Apa saja faktor penghambat bagi GAFSP dalam menangani krisis pangan di Bangladesh?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui GAFSP beserta program-programnya berperan dalam penanganan krisis pangan di Bangladesh,
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan program GAFSP untuk menangani krisis pangan di Bangladesh
3. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan program GAFSP untuk menangani krisis pangan di Bangladesh

Apabila tujuan dari penelitian ini dapat tercapai, penelitian ini diharapkan:

1. Dapat memberikan informasi bagi akademisi, khususnya akademisi Ilmu Hubungan Internasional dalam mengkaji dan memahami Teori Organisasi Internasional, Konsep Bantuan Luar Negeri, dan dan Konsep Ketahanan Pangan.
2. Dapat memberikan informasi tambahan bagi masyarakat umum mengenai peran GAFSP yang ditawarkan Bank Dunia sebagai solusi penanganan krisis pangan di Negara Berkembang, terkhusus di Banglades.

3. Dapat memberikan referensi kepada akademisi maupun peneliti-peneliti lainnya yang ingin juga tertarik untuk meneliti topik masalah yang sama.

D. Kerangka Konseptual

Berdasarkan hasil dan analisa dari latar belakang dan mengetahui masalah yang ada, maka diperlukan kerangka konseptual yang digunakan untuk membantu proses penjelasan penelitian ini. Untuk membantu penjelasan penelitian ini, penulis memakai konsep organisasi internasional, bantuan luar negeri, dan ketahanan pangan, dengan menggunakan perspektif Strukturalis.

1. Organisasi Internasional

Ilmu Hubungan Internasional merupakan ilmu yang mengkaji tentang sifat dan konsekuensi dari hubungan antar sistem negara yang berinteraksi satu sama lain dengan kepentingan masing-masing (Jackson & Sorensen, 2009). Sistem negara yang dimaksudkan disini merupakan sebuah institusi historis yang dibentuk oleh masyarakat dan pada hakikinya merupakan sebuah organisasi sosial dalam hubungan internasional (Jackson & Sorensen, 2009, hal. 12).

Seiring dengan perkembangan zaman, sistem internasional pun berkembang dan kini sudah semakin mengglobal. Kini, dalam interaksi-interaksi internasional, tidak hanya negara saja yang melakukannya, ada banyak lagi aktor-aktor lain yang melakukan karena di dukung oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuannya. Dalam

istilah Hubungan Internasional, dikenal ada dua jenis aktor, yaitu aktor Negara/*state actor* dan aktor non-negara/*non-state actor* (Rudi, 2005, hal. 23).

Organisasi internasional merupakan suatu pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah (Rudi, 2005, hal. 3).

Organisasi internasional adalah subjek hukum internasional bukan negara. Khususnya, karena organisasi internasional pada umumnya merupakan gabungan keanggotaan masyarakat internasional. Karena memiliki keanggotaan terbuka yang berasal dari seluruh lapisan masyarakat internasional, maka sangat penting untuk memperhatikan bagaimana kedudukan kedaulatan jika dipandang dengan kaca mata organisasi internasional. Satu hal yang perlu diingat, yakni organisasi internasional tidak memiliki kedaulatan supranasional atau dengan kata lain organisasi internasional, meskipun berada dalam ruang lingkup internasional, tapi negara tetap memiliki kedaulatan yang tidak bisa diganggu gugat. Selain itu, **Daniel S. Cheever** dan **H. Field Haviland Jr.** menyatakan bahwa,

Any cooperative arrangement instituted among states, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented through periodic meetings and staff activities (Cheever & Jr., 1996).

Secara sederhana, definisi organisasi internasional di atas mengandung tiga unsur penting, yaitu adanya keterlibatan negara dalam suatu pola kerja sama, adanya

pertemuan-pertemuan secara berkala, dan adanya staf yang bekerja sebagai "pegawai sipil internasional" (*international civil servant*).

2. Bantuan Luar Negeri

Konsep Bantuan Luar Negeri secara sederhana adalah proses transfer sumber daya antara dua pihak (pemberi, atau yang biasa disebut donor, dan penerima) dan proses transfer sumberdaya ini dilatarbelakangi oleh dua motivasi besar, yakni kendali dan keuntungan dalam ikatan ekonomi-politik kedua pihak tersebut.

Ada beberapa definisi mengenai bantuan luar negeri. Diantaranya, menurut Robert Gilpin dalam bukunya "*The Political Economy of International Relation*", dibahasakan bahwa bantuan luar negeri adalah sejumlah dana yang diberikan oleh negara-negara yang relatif kaya atau maju kepada negara yang secara ekonomi lebih miskin.

Negara-negara berkembang yang tengah menjalankan dan mengusahakan program pembangunan sudah sangat biasa dengan bantuan luar negeri. Hal ini dikarenakan, ketergantungan mereka yang sangat besar terhadap bantuan luar negeri karena desakan pembangunan dan persaingan global dewasa ini. Bantuan yang seringkali digunakan oleh beberapa Negara Berkembang adalah *Official Development Assistance* (ODA). ODA adalah sejenis bantuan luar negeri yang didefinisikan sebagai aliran dana kepada Negara-Negara Berkembang dengan karakteristik konsensional, yakni terdiri dari pinjaman dan hibah senilai minimal 25% dari jumlah keseluruhan bantuan yang syarat pembayarannya berupa bunga bersifat lunak (Official Development Assistance (ODA), 2008, hal. 1-4).

Maksud terselubung atas bantuan luar negeri kemudian berakibat pada ketergantungan antara negara berkembang terhadap Negara Maju atau organisasi-organisasi internasional. Bantuan luar negeri seringkali digunakan oleh aktor internasional tadi sebagai instrumen untuk kemudian merangkul para elit politik lokal untuk mempengaruhi kebijakan politik global yang menguntungkan mereka dari segi ekonomi. Kemudian, melalui jaringan internasional, keuangan internasional dan struktur produksi, bantuan luar negeri seringkali dimanfaatkan sebagai jembatan agar bisa mengeksploitasi sumberdaya alam negara penerima bantuan yang kebanyakan berasal dari negara berkembang.

Bagi para pemikir dependensia, hal ini seringkali dibahasakan dengan istilah ekspansi Negara-Negara Maju ke Negara-Negara Berkembang berupa sebuah sistem untuk mengekalkan ketergantungan antar-mereka. Hal ini secara jelas dibahasakan oleh Alan Rix dalam bukunya "*Japan's Foreign Aid Challenge: Policy Reform and Aid Leadership*", bahwa pelaksanaan pemberian bantuan luar negeri adalah tindakan yang tidak terlepas dari motivasi para pemberi bantuan luar negeri (negara donor) (Rix, 1993, hal. 18-19). Adapun motivasi yang dimaksud, yaitu motivasi kemanusiaan, motivasi politik, motivasi keamanan nasional, dan motivasi yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara donor.

3. Ketahanan Pangan

Konsep ketahanan pangan pertama kali diperkenalkan oleh FAO, yang secara sederhana menyiratkan yang penting pangan tersedia dalam jumlah yang cukup. WTO sendiri menyebut bahwa ketahanan pangan sebagai suatu keadaan dimana pangan tersedia di pasar, yaitu pangan yang mengabdikan kepada kepentingan pasar (Khudori, 2005, hal.

186). Bank Dunia mendefinisikan ketahanan pangan sebagai semua akses bagi semua orang pada semua waktu untuk mendapat kecukupan makanan untuk hidup yang aktif dan sehat. Menurut Bustanul Arifin (2005), ketahanan pangan merupakan tantangan yang mendapatkan prioritas untuk mencapai kesejahteraan bangsa pada abad millenium ini (Tawakal, 2010).

Ketahanan pangan seringkali disimpulkan sebagai suatu keadaan dimana tersedia pangan yang cukup bagi setiap orang di setiap waktu, dan dimana setiap individu tidak mengalami kesusahan untuk mengakses dan memperoleh pangan baik secara ekonomi, maupun fisik. Ada tiga faktor utama yang berkaitan dengan simpulan pengertian ketahanan pangan diatas, yaitu kecukupan (ketersediaan) pangan, stabilitas ekonomi pangan, dan aksesfisik maupun ekonomi bagi setiap individu untuk mendapatkan pangan.

Maxwell dan Frankenberger (1992) menyatakan bahwa ada dua indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian ketahanan pangan, yaitu indikator proses dan indikator dampak. Indikator proses adalah indikator yang menggambarkan situasi pangan yang ditunjukkan oleh ketersediaan dan akses terhadap pangan. Sedangkan indikator dampak yang dimaksud meliputi indikator langsung dan tidak langsung.

Indikator ketersediaan pangan yang dimaksud, berkaitan dengan produksi pertanian, iklim, akses terhadap sumberdaya alam, praktik pengelolaan lahan, pengembangan institusi, pasar, konflik regional, dan kerusuhan sosial. Sedangkan indikator akses pangan meliputi antara lain, sumber pendapatan, akses terhadap kredit modal, dan strategi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Selain itu, indikator dampak secara langsung yang dimaksudkan adalah konsumsi dan frekuensi pangan. Sedangkan indikator dampak secara tidak langsung yang dimaksud meliputi penyimpangan pangan dan status gizi (Khomsan, 2003). Ketahanan pangan seringkali diidentikkan dengan krisis pangan oleh Michael H. Glantz. Keterkaitan antara kedua konsep ini sangat erat dan saling berpengaruh satu sama lain. Hingga kini, belum ada definisi yang jelas mengenai krisis pangan. Krisis pangan hanya dikenal sebagai masalah yang disebabkan oleh banyak hal baik domestik maupun internasional, diantaranya kebijakan subsidi pangan suatu negara, sistem distribusi pangan, kebijakan perdagangan bebas terhadap komoditas pangan, pola konsumsi, ketersediaan lahan, dan lain-lain.

Dampak-dampak tersebut kemudian menjadi penyebab suatu kondisi dimana harga pangan yang naik sehingga masyarakat tidak bisa mengaksesnya dan atau stok pangan yang kurang di pasar-pasar lokal. Keadaan ini lah yang sering dibahasakan sebagai krisis pangan. Kemudian, dari masalah ini, muncullah sebuah konsep ketahanan pangan sebagai solusinya. Hal ini lah yang menjadi dasar bagi Michael H. Glantz dalam menyatakan keterkaitan yang erat antara krisis pangan dan ketahanan pangan dalam suatu kasus.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deksriptif eksplanatif. Penulis akan menggunakan penelitian deskriptif untuk menggambarkan bagaimana kondisi fenomena krisis pangan di Negara-Negara Berkembang, terkhusus di

Bangladesh, kemudian menggambarkan bagaimana penerapan *Global Agriculture and Food Security Program* (GAFSP) sebagai solusi penanganan krisis pangan yang ditawarkan oleh Bank Dunia. Setelah itu, penulis akan menggunakan penelitian eksplanatif untuk menjelaskan apakah program GAFSP tersebut betul dapat menjadi solusi dan bisa menjawab kebutuhan Bangladesh untuk menangani fenomena krisis pangan global

2. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Untuk memperjelas dan mempermudah proses penelitian, adapun jenis data yang penulis maksud adalah:

- a. *Framework Global Agriculture and Food Security Program* (GAFSP),
- b. Proposal pendampingan multilateral GAFSP di Bangladesh,
- c. Kesepakatan G8-HF di L'Aquila pada Juli 2009 dan Kesepakatan G20 di Pittsburgh, Pennsylvania pada September 2009,
- d. Kebijakan penanggulangan kelaparan dan krisis pangan di Bangladesh,
- e. Sistem Distribusi Pangan di Bangladesh,
- f. Kebijakan pangan untuk menjadi komoditas pasar dalam *Letter of Intent* (LoI) IMF tahun 1995, dan
- g. Kebijakan perdagangan bebas pangan dalam *Agreement on Agriculture* (AoA) WTO tahun 1998, *Global Hunger Index* (GHI) untuk melihat posisi Bangladesh.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka, yaitu cara pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik berupa buku, jurnal, dokumen, makalah, laporan,

majalah, surat kabar dan artikel yang berhubungan dengan masalah ini. Data diperoleh melalui penelitian penulis ke beberapa tempat seperti perpustakaan maupun lembaga-lembaga yang terkait, yaitu:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin di Makassar;
- b. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin;
- c. Perpustakaan Himpunan Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Unhas.

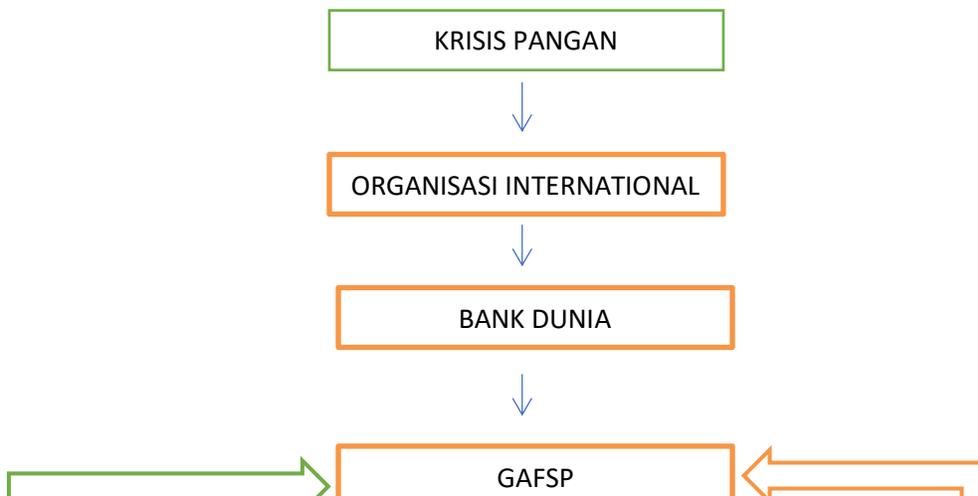
4. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dalam menganalisis data yang didapatkan selama proses penelitian. Dalam proses penelitian, penulis membuat bagan yang berfungsi sebagai kerangka pikir untuk mempermudah dan memperjelas alur penelitian skripsi ini. Adapun kerangka pikir yang penulis maksud, yaitu Kerangka Pikir Penelitian yang penulis maksudkan adalah arah yang menunjukkan bagaimana sistematika pembahasan yang akan penulis teliti dalam skripsi ini. Selain untuk membantu penulis sebagai peneliti dan penyusun, juga dapat membantu pembaca untuk memahami alur penelitiannya.

Sehubungan dengan urgensi dan pengaruhnya, krisis pangan telah menjadi masalah global. Oleh karena itu, aktor-aktor global pun menaruh perhatian yang besar untuk hal ini, salah satunya Bank Dunia. GAFSP adalah salah satu program bantuan Bank Dunia yang diterapkan diberbagai Negara Berkembang. Hal itu lah yang akan dibahas dalam Skripsi ini, yakni seberapa besar peranan GAFSP sebagai solusi penanganan krisis pangan di Negara Berkembang, dengan mengambil studi perspektif dua Negara Berkembang yang masing-masing mewakili kawasannya masing-masing,

yaitu Bangladesh.

Kerangka Konseptual Penelitian



5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan penulis adalah metode penulisan Induktif dengan mensinkronkan data-data yang didapat selama proses penelitian untuk kemudian dirumuskan dalam suatu simpulan atau hasil analisis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Organisasi Internasional

Organisasi internasional termasuk bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari jaringan hubungan internasional dan bahwa kebanyakan negara berpartisipasi dalam berbagai

jenis organisasi tidak hanya memperluas kemungkinan untuk kebijakan nasional tetapi menambah ikatan di tempat negara beroperasi (Herman & dkk, 1987, hal. 460).

Menurut **Duverger** yang dikutip dalam buku **Clive Archer** mengatakan bahwa:

Organisasi internasional merupakan suatu bentuk dari hubungan internasional yang berbentuk kolektif atau struktur dasar dari suatu organisasi sosial yang dibentuk atas dasar hukum atau tradisi manusia yang dapat berupa pertukaran, perdagangan, diplomasi, konferensi (Herman & dkk, 1987, hal. 2).

Menurut **Clive Archer**, organisasi internasional merupakan suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya. (Archer, International Organization, hal. 35).

Organisasi internasional menurut **Teuku May Rudy**, adalah:

Suatu pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda (Rudi, 2005, hal. 3).

Berdasarkan pengertian tersebut, dikemukakan bahwa organisasi menurut **Rudy** terdiri dari beberapa unsur, yaitu (Rudi, 2005, hal. 4):

1. Kerjasama yang ruang lingkungnya melintas batas negara.
2. Mencapai tujuan – tujuan yang disepakati bersama.
3. Baik antar pemerintah atau non-pemerintahan.
4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.
5. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan.

Viotti dan Kauppi menjelaskan organisasi internasional dalam konteks pemegang peran. Mereka mengemukakan bahwa:

Organisasi internasional dalam isu-isu tertentu berperan sebagai aktor yang independen dengan hak-haknya sendiri. Organisasi internasional juga memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan, memonitor dan menengahi perselisihan yang timbul dari adanya keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara-negara (Viotti & Kauppi, 1990, hal. 228).

Clive Archer mengidentifikasi klasifikasi organisasi internasional berdasarkan keanggotaannya yang terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. *Type of membership* (tipe keanggotaan)
 - a. *Inter-Governmental Organizations* (IGO), yaitu organisasi internasional dengan wakil pemerintahan-pemerintahan sebagai anggota.
 - b. *International Non-Governmental Organizations* (INGO), yaitu organisasi internasional dimana anggotanya bukan mewakili pemerintahan.
2. *Extent of membership* (jangkauan keanggotaan)
 - a. Keanggotaan yang terbatas dalam wilayah tertentu.
 - b. Keanggotaan yang mencakup seluruh wilayah di dunia (Archer, *International Organization*, hal. 66).

T. May Rudy memberikan penggolongan terperinci mengenai organisasi internasional menurut segi tinjauan berdasarkan 8 hal yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan administrasi : organisasi internasional antarpemerintah (*inter-governmental organization/IGO*) dan organisasi internasional nonpemerintahan (*nongovernmental organization / NGO*).

2. Ruang lingkup (wilayah) kegiatan dan keanggotaan : organisasi internasional global dan organisasi internasional regional
3. Bidang kegiatan (operasional) organisasi, seperti bidang ekonomi, lingkungan hidup, pertambangan, komoditi (pertanian, industri), bidang bea cukai, perdagangan internasional dan lain – lain
4. Tujuan dan luas bidang kegiatan organisasi : organisasi internasional umum dan organisasi internasional khusus.
5. Ruang lingkup (wilayah) dan bidang kegiatan : global–umum, global-khusus, regional–umum dan regional–khusus.
6. Menurut taraf kewenangan (kekuasaan): organisasi supranasional dan organisasi kerjasama.
7. Bentuk dan pola kerjasama : kerjasama pertahanan keamanan dan kerjasama fungsional.
8. Fungsi organisasi : organisasi politik (political organization), yaitu organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah – masalah politik dalam hubungan internasional; organisasi administratif, yaitu organisasi yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegiatan teknis secara administratif; dan organisasi peradilan yaitu organisasi yang menyangkut penyelesaian sengketa pada berbagai bidang atau aspek (politik, ekonomi, sosial dan budaya) menurut prosedur hukum dan melalui proses peradilan (sesuai dengan ketantuan internasional dan perjanjian internasional) (Rudi, 2005, hal. 7-10).

Menurut **Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe** (Coulombis & Wolfe, 1999, hal. 281), organisasi internasional dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori berdasarkan keanggotaan dan tujuannya, yaitu:

1. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya bersifat umum

Organisasi ini memiliki ruang lingkup global dan melakukan berbagai fungsi, seperti keamanan, sosial-ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, pertukaran kebudayaan, dan lain sebagainya. Contohnya adalah PBB.

2. Organisasi yang keanggotaannya umum tetapi tujuannya terbatas

Organisasi ini dikenal juga sebagai organisasi fungsional karena diabdikan untuk satu fungsi spesifik. Contohnya *International Labour Organization* (ILO), *World Health Organization* (WHO), *United Nations on AIDS* (UNAIDS), dan lain sebagainya.

3. Organisasi yang keanggotaannya terbatas tetapi tujuannya umum

Organisasi seperti ini biasanya adalah organisasi yang bersifat regional yang fungsi dan tanggung jawab keamanan, politik dan sosial-ekonominya berskala luas. Contohnya adalah Uni Eropa, Organisasi Negara-negara Amerika (OAS), Uni Afrika, dan lain sebagainya.

4. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya terbatas

Organisasi ini dibagi atas organisasi sosial-ekonomi, contohnya adalah Asosiasi Perdagangan Bebas Amerika Latin (LAFTA), serta organisasi militer/pertahanan, contohnya adalah *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dan Pakta Warsawa.

Menurut **Clive Archer**, secara umum fungsi organisasi internasional dapat dibagi ke dalam sembilan fungsi, yaitu:

1. Artikulasi dan agregasi

Organisasi internasional berfungsi sebagai instrument bagi negara untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingannya, serta dapat mengartikulasikan

kepentingannya sendiri. Organisasi internasional menjadi salah satu bentuk kontak institusionalisme antara partisipan aktif dalam sistem internasional, yaitu sebagai forum diskusi dan negosiasi.

2. Norma

Organisasi internasional sebagai aktor, forum dan instrument yang memberikan kontribusi yang berarti bagi aktivitas-aktivitas normatif dari sistem politik internasional. Misalnya dalam penetapan nilai-nilai atau prinsip-prinsip non-diskriminasi.

3. Rekrutmen

Organisasi internasional menunjang fungsi penting untuk menarik atau merekrut partisipan dalam sistem politik internasional.

4. Sosialisasi

Sosialisasi berarti upaya sistematis untuk mentransfer nilai-nilai kepada seluruh anggota sistem. Proses sosialisasi pada level internasional berlangsung pada tingkat nasional yang secara langsung mempengaruhi individu-individu atau kelompok-kelompok di dalam sejumlah negara dan di antaranya negara-negara yang bertindak pada lingkungan internasional atau di antara wakil mereka di dalam organisasi. Dengan demikian, organisasi internasional memberikan kontribusi bagi penerimaan dan peningkatan nilai kerjasama.

5. Pembuat peraturan

Sistem internasional tidak mempunyai pemerintahan dunia, oleh karena itu, pembuatan keputusan internasional biasanya didasarkan pada praktek masa lalu, perjanjian ad hoc, atau oleh organisasi internasional.

6. Pelaksanaan peraturan

Pelaksanaan keputusan organisasi internasional hampir pasti diserahkan kepada kedaulatan negara. Di dalam prakteknya, fungsi aplikasi aturan oleh organisasi internasional seringkali lebih terbatas pada pengawasan pelaksanaannya, karena aplikasi sesungguhnya ada di tangan negara anggota.

7. Pengesahan peraturan

Organisasi internasional bertugas untuk mengesahkan aturan-aturan dalam sistem internasional. Fungsi adjudikasi dilaksanakan oleh lembaga kehakiman, namun fungsi ini tidak dilengkapi dengan lembaga yang memadai dan tidak dibekali oleh sifat yang memaksa sehingga hanya terlihat jelas bila ada pihak-pihak negara yang bertikai.

8. Informasi

Organisasi internasional melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi.

9. Operasional

Organisasi internasional menjalankan sejumlah fungsi operasional di banyak hal yang sama halnya seperti dalam pemerintahan. Fungsi pelaksanaan yang dilakukan organisasi internasional terlihat pada apa yang dilakukan oleh UNHCR yang membantu pengungsi, World Bank yang menyediakan dana, UNICEF yang melakukan perlindungan terhadap anak-anak, dan lain sebagainya (Archer, International Organization, hal. 69-78).

Menurut **Harold K. Jakobson** fungsi organisasi internasional dapat dikategorikan dalam lima hal pokok (Jakobson, 1979, hal. 89-90):

1. Fungsi informasi termasuk didalamnya adalah pengumpulan, analisa, pertukaran, dan desiminasi data dan informasi. Guna menjalankan fungsi ini, organisasi internasional dapat menggunakan staffnya atau menyediakan suatu forum dimana konstituennya dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
2. Fungsi normatif meliputi pendefinisian dan pendeklarasian suatu norma standar. Fungsi ini tidak memasukan instrumen yang memiliki efek mengikat secara hukum, tetapi sebatas pertanyaan-pertanyaan yang mempengaruhi lingkungan domestik dan internasional.
3. Fungsi pembuatan peraturan yang hampir sama dengan fungsi normatif tetapi lebih menekankan pada efek mengikat secara hukum. Agar produk yang dihasilkan mengikat secara hukum. Maka negara anggota harus melakukan ratifikasi atas suatu peraturan dan peraturan itu berlaku bagi yang meratifikasi saja.
4. Fungsi pengawasan dan pelaksanaan peraturan dimana dalam hal tersebut organisasi internasional menetapkan ukuran-ukuran pelanggaran dan menetapkan langkah-langkah penanganan terhadap pelanggaran suatu peraturan.
5. Fungsi operasional yang meliputi penggunaan sumber daya organisasi.

Peran organisasi internasional adalah sebagai berikut: 1) Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik (sesama anggota); 2) Sebagai sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan; 3) Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan, antara lain kegiatan sosial; kemanusiaan; bantuan pelestarian lingkungan hidup; *peace keeping operation* dan lain-lain (Perwita & Yani, 2005, hal. 27).

L. Bennet membagi peranan organisasi internasional dalam 3 kategori, yaitu sebagai berikut (Bennet, 1993, hal. 8):

1. Organisasi internasional sebagai sumber legitimasi kolektif bagi aktifitas-aktifitas organisasi atau anggota secara individual.
2. Organisasi internasional sebagai penentu agenda internasional.
3. Organisasi internasional sebagai wadah bagi koalisi antar anggota atau koordinasi kebutuhan antar pemerintah sebagai mekanisme untuk menentukan karakter dan struktur kekuasaan global.

Menurut **Clive Archer**, yang dikutip oleh **Perwita dan Yani**, menjelaskan bahwa peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Sebagai instrumen. Organisasi Internasional digunakan oleh negara–negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota – anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah–masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah – masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.
3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (Perwita & Yani, 2005, hal. 95).

Peran pertama dari organisasi internasional adalah sebagai instrumen digunakan oleh anggota-anggotanya untuk tujuan tertentu, biasanya terjadi pada IGO, dimana anggota-anggotanya merupakan negara berdaulat yang dapat membatasi tindakan-tindakan organisasi internasional. Peranan organisasi internasional sebagai instrumen dianggap mempunyai suatu kekuatan yang sangat mendukung bagi kepentingan nasional suatu negara. Gambaran dari

organisasi internasional sebagai instrumen bagi anggotanya tidak berarti bahwa setiap keputusan yang diambil oleh organisasi internasional itu bertujuan untuk memenuhi setiap kepentingan anggotanya.

Ketika suatu organisasi internasional dibuat, maka implikasinya adalah diantara negara-negara suatu kesepakatan terbatas telah disetujui dalam bentuk instrumental untuk pengaturan secara multilateral aktivitas negara-negara dalam lingkup tertentu. Organisasi penting bagi kepentingan kebijakan nasional dimana koordinasi multilateral tetap menjadi sasaran jangka panjang pemerintah nasional (Archer, *International Organization*, hal. 130-131). Peranan kedua organisasi internasional sebagai arena atau forum, dimana didalamnya terjadi aksi-aksi. Dalam hal ini organisasi internasional menyediakan tempat-tempat pertemuan bagi anggotanya untuk berkumpul bersama-sama untuk berdiskusi dan bekerjasama. Sebagai suatu arena, organisasi internasional berguna bagi masing-masing kelompok yang bersaing untuk menjadi forum bagi pandangan mereka serta dapat pula menjadi kekuatan diplomatik bagi kebijakan-kebijakannya, baik di waktu perang dingin ataupun perang dekolonisasi (Archer, *International Organization*, hal. 136). Peran ketiga dari organisasi internasional adalah sebagai aktor yang independen, dimana independen diartikan apabila organisasi internasional dapat bertindak tanpa dipengaruhi kekuatan dari luar. Dalam hal ini, organisasi internasional dapat memberikan masukan-masukan secara netral tanpa ada kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dari luar.

B. Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri merupakan bentuk dari kerjasama internasional antar-negara. Kerjasama yang meliputi bilateral; multilateral hingga regional telah mencakup kerjasama

dengan memberikan program bantuan kepada satu negara atau beberapa negara. Tujuannya adalah untuk menjalankan program kerjasama dan mencapai kepentingan suatu negara ataupun organisasi internasional pemberi bantuan.

Secara historis, kebanyakan bantuan luar negeri telah diberikan sebagai bantuan bilateral langsung dari satu negara ke negara lain. Para donor juga memberikan bantuan secara tidak langsung sebagai bantuan multilateral, di mana sumber dayanya berasal dari beberapa donor (Radelet, 2006, hal. 4).

Bantuan luar negeri diartikan oleh **Robert Gilpin**, yaitu secara spesifik sebagai sejumlah dana yang diberikan oleh negara yang relatif maju atau kaya kepada negara yang secara ekonomi lebih miskin (Holsti, 1995, hal. 180). Sedangkan dalam arti luas, **K.J. Holsti** mengartikan bantuan luar negeri sebagai transfer uang, teknologi, ataupun nasihat-nasihat teknis dari negara donor ke negara penerima (Holsti, 1995, hal. 181).

Bantuan luar negeri (*foreign aid*) didefinisikan sebagai semua jenis bantuan yang diberikan oleh negara atau lembaga donor internasional, baik berupa pinjaman atau hibah dengan persyaratan tertentu (Wite, 1974, hal. 188). Setiap negara memiliki kepentingan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program-program kebijakan luar negerinya. Terkait dengan kebijakan luar negeri yang memiliki nilai kepentingan negara, maka salah satu bentuk kebijakan itu dapat dituangkan dalam bentuk bantuan luar negeri (A World Bank Policy Research Report, 1998, hal. 7).

Pearson dan Paysilian merumuskan pengertian bantuan luar negeri dengan ditinjau dari berbagai perspektif yang biasa digunakan dalam menganalisis fenomena, yaitu bantuan atau pinjaman luar negeri. Beberapa definisi tersebut, yaitu (Perwita & Yani, 2005):

- a. Aliran Realis berpendapat bahwa tujuan utama bantuan luar negeri adalah bukan untuk menunjukkan idealisme abstrak aspirasi kemanusiaan, tetapi untuk proyeksi power nasional. Bantuan luar negeri merupakan komponen penting bagi kebijakan keamanan internasional.
- b. Aliran idealis mendefinisikan bahwa aturan bantuan luar negeri secara esensial merupakan gerakan kemanusiaan yang menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan internasional. Pemikiran ini menyatakan bahwa negara yang lebih kaya memiliki tanggung jawab moral untuk membantu negara-negara yang membutuhkan. Sehingga bantuan luar negeri mendorong dukungan yang saling menguntungkan dan sejalan dengan pembangunan ekonomi, hak asasi manusia, dan ketertiban internasional.
- c. Dalam teori *Bureaucratic Incrementalist* disebutkan bahwa bantuan luar negeri merupakan suatu kebijakan publik, produk dari politik domestik yang menyebabkan opini publik, kelompok kepentingan, dan institusi pemerintah yang secara langsung terlibat dalam proses pembuatan kebijakan yang mempromosikan kepentingan nasional melalui agenda politik.
- d. Dalam teori Ketergantungan (*Dependencia*) menyatakan bahwa bantuan luar negeri dilakukan oleh negara kaya untuk mempengaruhi hubungan domestik dan luar negeri negara penerima bantuan. Selain itu juga bertujuan merangkul elit politik lokal di negara penerima untuk tujuan komersil dan kemandirian nasional. Kemudian melalui jaringan internasional, keuangan internasional, dan struktur produksi, bantuan luar negeri digunakan dengan tujuan untuk melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam negara penerima. Sehingga, bantuan luar negeri dapat digunakan sebagai sebuah instrumen untuk

perlindungan dan ekspansi negara kaya ke negara miskin seperti sebuah sistem yang mengekalkan keuntungan.

Bantuan luar negeri atau bantuan pembangunan merupakan salah satu instrumen ekonomi yang umum digunakan oleh negara-negara maju untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri, terutama sejak akhir Perang Dunia II. Bantuan sebagian besar terdiri dari transfer uang, barang atau jasa dari satu negara ke negara lain. Bantuan militer dan bantuan pangan adalah salah satu bentuk awal dari bantuan luar negeri. Di dekade terakhir proyek bantuan dengan tujuan meningkatkan infrastruktur di negara penerima telah menjadi semakin umum (Lengauer, 2011, hal. 2).

Instrumen ekonomi dalam suatu kebijakan digunakan untuk mengubah perilaku dan sikap target baik kebijakan domestik maupun kebijakan luar negerinya dengan suatu tujuan yang jelas. Instrumen ekonomi tersebut dapat berupa *rewards* (hadiah) dan *coercion* (paksaan). Salah satunya dengan memberikan hibah atau bantuan tertentu, termasuk hibah militer. Ketika sikap target sesuai dengan yang diharapkan oleh pendonor, maka pendonor akan memberi *rewards* (hadiah) berupa bantuan yang berkesinambungan atau ketika sikap target tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh negara pendonor, negara pendonor akan mengeluarkan sikap *coercion* (paksaan) seperti dengan menghentikan bantuan tersebut dengan harapan negara penerima akan mempertimbangkan sikapnya kembali. Melalui cara ini, negara pendonor dapat memanipulasi bantuan luar negeri untuk tujuan politik atau aspek lain untuk mencapai kepentingan nasional negara pendonor (Soeprapto, 1997, hal. 167 & 170).

Salah satu instrumen penting dalam menghubungkan *foreign aid* dengan kebijakan luar negeri adalah dengan menggunakan pendekatan **Edward. S Manson**. Menurut Manson,

bantuan luar negeri yang dilihat sebagai suatu instrumen kebijakan luar negeri biasanya secara tidak langsung merujuk pada program-program bantuan luar negeri yang dibentuk terutama berdasarkan kepentingan negeri pemberi bantuan. Namun demikian pada hakikatnya hal itu dapat bukan berarti kepentingan negara penerima dapat dikesampingkan. Bantuan luar negeri di posisikan sebagai instrumen kebijakan luar negeri dapat digunakan dalam analisis jika diasumsikan bahwa terdapat kepentingan antara negara pemberi bantuan dan negara penerima bantuan (Manson, 1964, hal. 3-5).

Bantuan luar negeri digolongkan ke dalam tiga jenis bantuan, yaitu (Biro Perencanaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, 1999, hal. 4):

a. Bantuan Program (*Program Aid*)

Bantuan Program adalah bantuan berupa devisa yang diperlukan untuk menutupi kekosongan neraca pembayaran, yang digunakan untuk mengimpor barang-barang yang diperlukan masyarakat, seperti bantuan pangan dan komoditas.

b. Bantuan Proyek (*Project Aid*)

Project Aid adalah bantuan yang diberikan kepada pemerintahan berupa valuta asing yang ditukarkan ke dalam mata uang negara penerima dan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan proyek-proyek pembangunan baik dalam rangka rehabilitasi, pengadaan barang atau peralatan dan jasa, serta perluasan atau pengembangan proyek-proyek pembangunan baru.

c. Bantuan Teknik (*Technical Assistance*)

Bantuan yang diberikan adalah berupa tenaga ahli, pelatihan, dan peralatan. Inti daripada bantuan teknik ini adalah dimungkinkannya ahli teknologi, yakni dengan mengisi kekosongan dalam bidang-bidang keahlian tertentu dan sekaligus memindahkan keahlian para tenaga ahli internasional kepada tenaga kerja di dalam negeri.

Menurut **Alan Rix**, bantuan luar negeri dari Negara pendonor untuk Negara penerima bantuan tidak terlepas dari maksud dan motifasi para Negara donor. Motivasi yang dimaksud, yaitu (Rix, 1993, hal. 18-19):

- a. Motivasi kemanusiaan, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di Negara-negara berkembang melalui dukungan kerjasam ekonomi.
- b. Motivasi politik, yang dimaksud untuk meningkatkan imej Negara pendonor, pujian menjadi tujuan daari pemberian bantuan luar negri baik dari sektor politik domestik dan hubungan luar negri Negara pendonor.
- c. Motivasi keamanan nasional, yang mendasarkan pada asumsi bahwa bantuan luar negeri dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong stabilitas politik dan akan memberikan keuntungan bagi Negara pendonor, dengan kata lain motif keamanan nasional ini memiliki sisi ekonomi.
- d. Motivasi kepentingan nasional, yaitu motif yang berkaitan pada kepentingan nasional Negara pendonor.

Menurut **Yanuar Ikbar**, motif ekonomi merupakan pembenaran yang paling rasional untuk pemberian bantuan, argumentasi esensial dari bantuan luar negeri yang secara mendasar dapat dipahami dari beberapa konsep, yaitu (Ikbar, 2007, hal. 191-192):

1. Sumber daya dan kapabilitas keuangan dari luar (untuk pinjaman dan hibah);

2. Bantuan luar negeri kebanyakan diberikan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan di negara-negara yang diberi bantuan;
3. Bantuan luar negeri tidak hanya berbentuk modal, tetapi juga tenaga ahli dan manajemen dan alih teknologi;
4. Pengalihan investasi untuk tujuan mendekati pasar, perluasan industrialisasi internasional di luar negeri pemberi bantuan dan pengalihan industri senjata.

Sedangkan terdapat indikator atau faktor yang menyebabkan negara-negara melakukan pinjaman luar negeri, baik yang bersifat konsensial (lunak) maupun bukan konsensial (syarat ketat) yaitu:

1. Alasan ekonomi;
2. Alasan moralitas/kemanusiaan;
3. Alasan strategis.

Dalam konteks prioritas alasan ekonomi, ditinjau dari sudut pemberi bantuan maupun peminjam dana, terdapat dua orientasi yang menjadi model yakni model kesenjangan (hambatan kekurangan devisa) dan model kesenjangan tabungan. Terdapat dua jurang dalam pembangunan ekonomi sebagai kendala yang terpisah dan independen pada pencapaian target tingkat pertumbuhan di tingkat negara-negara terbelakang. Bantuan luar negeri dipandang sebagai suatu cara atau alternatif untuk menutup kedua jurang itu dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan (Jhingan, 2007, hal. 614).

C. Ketahanan Pangan

Istilah ketahanan pangan pertama kali digunakan pada tahun 1971 oleh PBB untuk membebaskan dunia terutama negara–negara berkembang dari krisis produksi dan krisis suplai

makanan pokok. Fokus ketahanan pangan pada masa itu menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan pokok dan membebaskan daerah dari krisis pangan. Definisi ketahanan pangan dari PBB dirumuskan sebagai berikut: *Food security is availability to avoid acute food shortages in the event of wide spread crop failure or other disaster* (Syarief & dkk, 1999).

Maxwell menelusuri perubahan-perubahan definisi tentang ketahanan pangan sejak *World Food Summit* tahun 1974 hingga pertengahan dekade 1990-an. Menurutnya, perubahan yang terjadi pada konsep ketahanan pangan, dapat terjadi pada level global, nasional, skala rumah tangga, dan bahkan individu. Perkembangannya terlihat dari perspektif pangan sebagai kebutuhan dasar (*food first perspective*) hingga pada perspektif penghidupan (*livelihood perspective*) dan dari indikator-indikator objektif ke persepsi yang lebih subjektif.

Selain itu, **Maxwell & Slatter** pun turut menganalisis diskursus mengenai definisi ketahanan pangan tersebut. Mereka menemukan bahwa ketahanan pangan berubah sedemikian cepatnya dari fokus terhadap ketersediaan-penyediaan (*supply and availability*) ke perspektif hak dan akses (*entitlements*). Sejak tahun 1980-an, diskursus global ketahanan pangan didominasi oleh hak atas pangan (*food entitlements*), risiko dan kerentanan (*vulnerability*) (Maxwell & Slater, 2003, hal. 531).

Sejarah penggunaan istilah ketahanan pangan dalam kebijaksanaan dunia, pertama kali diluncurkan pada tahun 1971 oleh PBB, tetapi Indonesia secara formal baru mengadopsi ketahanan pangan dalam kebijakan dan program pada tahun 1992 yang kemudian definisi ketahanan pangan pada Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996, yaitu ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau (Kaeron, 2012, hal. 71).

Setelah dekade 1990-an, kebijakan pangan yang berorientasi pada ketahanan pangan (*food security*) yang sebenarnya dapat disederhanakan menjadi dimensi “ketersediaan pangan” dan “aksesibilitas masyarakat” terhadap bahan pangan pada skala rumah tangga dan skala nasional. Jika salah satu dari unsur-unsur diatas tidak terpenuhi, maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, akan tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh (Arifin, Ekonomi Pembangunan Pertanian, 2013, hal. 253).

Masa depan kebijakan pangan kembali memperoleh tantangan yang cukup berat, yaitu berupa faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut meliputi perubahan iklim, eskalasi harga pangan strategis, dan lain-lain yang semakin nyata mengancam kinerja produksi dan ketersediaan pangan di dalam negeri. Tantangan menjadi semakin berat setelah perkembangan ekonomi pangan di tingkat global juga bergerak ke arah yang semakin tidak menentu. Struktur perdagangan komoditas pangan pokok terutama beras semakin sulit dipercaya setelah negara-negara produsen beras lebih banyak terfokus untuk mengatasi persoalan-persoalan di dalam negerinya sendiri dan tidak jarang melakukan kejutan-kejutan perdagangan (*trade shock*), seperti restriksi ekspor dan proteksi berlebihan, sehingga Indonesia tidak pantas menggantungkan urusan ketahanan pangannya hanya kepada beras impor (Arifin, Diagnosis Ekonomi Politik Pangan dan Pertanian, 2007, hal. 36).

Ketersediaan dan kecukupan pangan juga mencakup kuantitas dan kualitas bahan pangan agar setiap individu dapat terpenuhi standar kebutuhan kalori dan energi. Penyediaan pangan tentunya dapat ditempuh melalui: (1) produksi sendiri, dengan cara memanfaatkan dan alokasi sumber daya alam, manajemen dan pengembangan sumber daya manusia, serta aplikasi

dan penguasaan teknologi yang optimal; dan (2) impor dari negara lain, dengan menjaga perolehan devisa yang memadai dari sektor dan subsektor perekonomian untuk menjaga neraca keseimbangan perdagangan luar negeri (Arifin, Diagnosis Ekonomi Politik Pangan dan Pertanian, 2007, hal. 51).

Ketahanan Pangan (*food security*) minimal mengandung dua unsur pokok, yaitu “ketersediaan pangan” dan “aksesabilitas masyarakat” terhadap bahan pangan tersebut. Salah satu dari unsur diatas terpenuhi, maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh (Arifin, Diagnosis Ekonomi Politik Pangan dan Pertanian, 2007, hal. 37).

Ketahanan pangan merupakan hasil sinergi dan interaksi dari subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi, dimana dalam mencapainya bisa dilakukan dengan swasembada atau mencukupinya dengan membeli dari pihak atau negara lain. Idealnya semua kebutuhan pangan dipenuhi dari dalam negeri, tetapi banyak faktor obyektif yang menjadikan upaya tersebut tidak bisa diwujudkan, termasuk oleh negara paling maju sekalipun. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam ketahanan pangan ini antara lain, adalah: faktor kebijakan, faktor jumlah penduduk, faktor perubahan iklim, faktor kemarau dan bencana alam, konversi lahan dan pertumbuhan ekonomi, dan konflik pangan dan energi (Arifin, Diagnosis Ekonomi Politik Pangan dan Pertanian, 2007, hal. 66).

Simatupang dan **Fleming** berpendapat bahwa, ketahanan pangan berkelanjutan (*sustainable food security*), meliputi enam kriteria yaitu antara lain: *avalibility* (ketersediaan), *accessibility* (keterjangkauan), *utilization*, *stability*, *self-*

reliance, sustainability. Oleh karena itu, ketahanan pangan dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, geo-bio-physic, sosial, dan kelembagaan serta keadaan politik (Widodo, 2012, hal. 161).

Menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO) pada tahun 1995, bahwa setiap orang mempunyai hak asasi untuk bebas dari kelaparan dan kekurangan gizi serta memperoleh kehidupan yang bermartabat, sehingga aksesnya terhadap pangan yang diinginkan sepanjang waktu dijamin. Menurut laporan FAO, secara konseptual ada tiga aspek utama yang menjadi pilar ketahanan pangan, yaitu: Pertama, aspek ketersediaan (*availability*), ketersediaan pangan ini bisa diperoleh dengan cara impor atau berasal dari produksi domestik, karena yang dipentingkan adalah tersedia jumlah pangan yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat; Kedua, aspek keterjangkauan (*accessibility*), aspek ini sering dikaitkan dengan persoalan harga pangan dan juga subsidi, sehingga bahan pangan mudah dijangkau individu atau rumah tangga dengan harga yang baik dan kualitas yang baik; dan Ketiga, aspek stabilitas (*stability*), sebagai komoditas strategis atau pokok, maka aspek ini sangat penting untuk negara seperti Indonesia karena banyak bukti menunjukkan gejolak pangan membawa implikasi yang sangat luas. Aspek stabilitas ini merujuk pada kemampuan pemerintah dalam meminimalkan kemungkinan terjadinya konsumsi pangan berada dibawah level kebutuhan standar pada musim-musim sulit (paceklik atau bencana alam), sehingga tidak terjadi gejolak ekonomi dan politik yang berbasis persoalan pangan (Widodo, 2012, hal. 75).

Menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO), ketahanan pangan ada ketika semua orang, setiap saat memiliki akses fisik dan ekonomi yang memadai terhadap makanan yang aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sesuai dengan preferensi pangan untuk hidup aktif dan sehat. Setidaknya ada empat aspek atau pilar ketahanan pangan,

yaitu: aspek ketersediaan (*food availability*), aspek stabilitas ketersediaan atau pasokan (*stability of supplies*), aspek keterjangkauan (*access to supplies*), dan aspek konsumsi pangan (*food utilization*) (Kaeron, 2012, hal. 83).

Ketahanan pangan tidak hanya menyangkut jangka pendek, melainkan yang lebih penting juga jangka panjang, yaitu bagaimana dapat menciptakan keadaan yang dapat mendorong produksi yang stabil dengan tren yang meningkat. Hal ini akan menyangkut beberapa masalah kelembagaan, stabilisasi, efisiensi produksi, kebijakan harga dan tarif (kebijakan fiskal). Stabilitas produksi dengan tren naik dan stabilitas harga mempengaruhi ketahanan pangan dari dua segi yaitu secara langsung dan tidak langsung, antara lain: (1) Secara langsung pada konsumsi yang mempengaruhi permintaan dan (2) Secara tidak langsung pada produksi jangka panjang yang mempengaruhi penawaran (Widodo, 2012, hal. 169).

BAB III

GLOBAL AGRICULTURE AND FOOD SECURITY PROGRAM (GAFSP) DAN KRISIS PANGAN DI BANGLADESH

A. Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP)

1. Pengenalan Program

Bank Dunia (World Bank) merupakan organisasi internasional yang selalu menaruh perhatian terhadap Negara-Negara Berkembang dengan setiap bantuannya, telah melakukan beberapa pergerakan untuk mengatasi fenomena krisis pangan global ini. Pada tanggal 19 Maret 2010, Bank Dunia melalui program *Global*